

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 7



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Kompas	Sindo	Tempo
Indopos	Pos Kota	Warta Kota

## Anies-Sandi Masih Godok Aturan Rumah Murah

Bank Indonesia meminta skema pembiayaan rumah uang muka nol rupiah.

### Avit Hidayat

avit.hidayat@tempo.co.id

JAKARTA - Pemerintah Jakarta masih menggodok peraturan untuk program pembangunan rumah murah dengan uang muka nol rupiah. Program itu merupakan satu di antara program prioritas pemenuhan janji kampanye Gubernur Anies Baswedan dan wakilnya, Sandiaga Uno.

"DP (*down payment*) nol persen itu kan belum ada payung hukumnya. Jadi, perlu peraturan gubernur yang mengatur," kata Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota, Agustino Darmawan, akhir pekan lalu.

Selain mekanisme pembiayaan, kata Agustino, beberapa hal yang akan diatur antara lain spesifikasi bangunan rumah serta aturan mengenai kredit macet, termasuk aturan kerja sama dengan swasta. Draf peraturan gubernur diperkirakan baru rampung pada tahun depan. "Dan dapat dieksekusi pada tahun yang sama," katanya.

Secara terpisah, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Donny P. Djoeono, meminta pemerintah DKI Jakarta memastikan apakah program pembangunan rumah dengan uang muka nol rupiah itu akan dibiayai bank, swasta, atau sepenuhnya dianggarkan dari APBD.

Bank Indonesia, kata Donny, berkepentingan jika skema pembiayaan nanti menggandeng bank. Dia mengantisipasi risiko kredit macet dari nasabah. "Kalau menggandeng bank, nanti kami wajib melihat skemanya bagaimana."

Donny menjelaskan, pemerintah DKI memang bisa merencanakan program rumah murah tanpa uang muka tersebut. Dalam Pasal 17 Peraturan Bank

Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Rasio Loan to Value (LTV) untuk Kredit Properti dijelaskan bahwa kredit dalam program pemerintah pusat ataupun daerah dikecualikan dari ketentuan peraturan ini sepanjang memperhatikan prinsip kehati-hatian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Karena itu, Bank Indonesia bertugas melihat skema yang bakal dirumuskan pemerintah Jakarta," kata dia lagi.

Sebelumnya, Wakil Gubernur Sandiaga Uno menyatakan telah menemukan lokasi pembangunan rumah itu di Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Pembangunan direncanakan berupa rumah vertikal di atas lahan milik PD Pembangunan Sarana Jaya. Tapi Sandiaga belum membeberkan rencana skema pembiayaannya.

Direktur Utama PD Pembangunan Sarana Jaya, Yoory Pinontoan, membenarkan pada awal tahun depan pihaknya akan mulai membangun dua menara khusus untuk program uang muka nol rupiah. Rencananya dua tower itu terdiri atas 700 unit. Ia mengaku memerlukan waktu hingga dua tahun untuk menyelesaikan program tersebut.

Menurut Yoory, pembiayaan bersumber dari uang perusahaan. Jika kurang, dia mengatakan tak menutup adanya kemungkinan meminjam Bank DKI yang,

menurut dia, telah siap memberi kucuran dana. Tapi dia masih enggan membeberkan kebutuhan dana yang diperlukan untuk membiayai program tersebut.

Direktur Utama PT Jakarta Propertindo, Satya Heragandhi, juga belum mem rincikan harga satuan unit rumah yang akan dijual ke masyarakat. Perusahaan itu bersama Sarana Jaya dan dua BUMD lainnya mendapat tugas menyelesaikan program rumah dengan DP nol rupiah. "Kemarin kami baru bicarakan ada tiga-empat titik aset DKI yang bisa dijadikan rumah bertingkat," kata Satya, Jumat lalu.

Pemerintah Gubernur Anies Baswedan berencana membangun 250 ribu unit rumah murah dalam kurun waktu lima tahun. Untuk anggaran belanja tahun depan, dia mengalokasikan dana Rp 800 miliar untuk pembelian lahan. Alokasi itu melonjak dari yang semula dirancang sebesar Rp 100,6 miliar.

Pantas Nainggolan, anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Komisi Bidang Pembangunan yang mengurus di antaranya perumahan dan gedung pemerintahan, menyarankan agar pemerintah menuntaskan dulu skema pembiayaan dan spesifikasi agar sesuai dengan aturan. "Secara konseptual harus sudah betul-betul siap."

Bulan :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 0 1 7



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Kompas Sindo Tempo  
Indopos Pos Kota Warta Kota

## Anies-Sandi Masih Godok Aturan Rumah Murah

### APBD Tanggung Uang Muka Rumah Rp 2,7 Triliun

Anies-Sandiaga menjanjikan pembangunan 250-300 ribu unit rumah murah sepanjang lima tahun ke depan untuk warga Jakarta. Rumah murah dengan uang muka nol rupiah itu ditujukan hanya untuk mereka yang berpenghasilan Rp 7-10 juta per bulan. Keduanya becermis pada program serupa yang ada di Singapura. Berikut ini perencanaan yang dibuat keduanya, dikutip dari [www.jakartamajubersama.com](http://www.jakartamajubersama.com).

1.  
Pemerintah DKI akan membangun hunian vertikal dengan harga sekitar **Rp 350 juta** per unit.

2.  
Lama cicilan pembiayaan untuk kepemilikan rumah bisa diperpanjang menjadi **20-30 tahun**.

3.  
Perkiraan anggaran daerah yang akan digelontorkan untuk menutup uang muka nol rupiah sebesar **Rp 2,7 triliun** per tahun.

4.  
Pembangunan rumah vertikal akan dimulai pada tahun depan.

5.  
Pemerintah akan membentuk badan layanan umum pengelola perumahan rakyat.

● AVIT HIDAYAT | ILLUSTRASI: INDRA FALIZI

